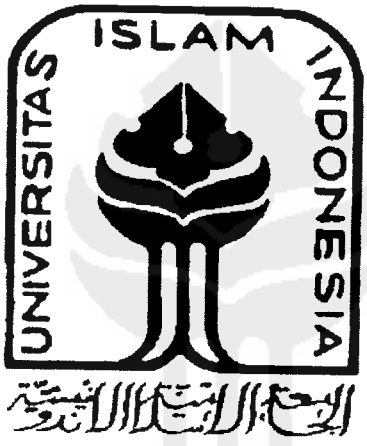
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1990-2004

SKRIPSI



Oleh:

Nama	: Ardian Damar Sasono
Nomor Mahasiswa	: 02313049
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

PENGESAHAN

Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul 1990-2004

Nama	:	Ardian Damar Sasono
Nomor Mahasiswa	:	02313049
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 November 2006
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

Jaka Sriyana, Dr.,Drs.,M.Si

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1990-2004

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ardian Damar Sasono

Nomor Mahasiswa : 02313049

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Efisien dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul 1990 - 2004

Disusun Oleh: ARDIAN DAMAR SASONO
Nomor mahasiswa: 02313049

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 12 Desember 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi	: Drs. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D	.....
Penguji I	: Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc	.....
Penguji II	: Dra. Ari Ruatin, M.Si	.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- *Kedua Orang Tuaku tercinta:*

  Bapak M. Joko Sasono

  dan Ibu Sudjarwanti

- *Adikku: Giri Aji Nur Sasono*

- *Sahabat-sahabatku*

MOTTO

- *"Kesenangan dunia hanyalah sedikit sekali dibandingkan dengan kesenngan akhirat yang jauh lebih baik, bagi mereka yang bertaqwa dan kamu tidak akan teraniaya sedikit pun".*
  (QS An Nisaa :77)

- *"Di manapu kamu berada, maut akan menjemputmu, meskipun kamu berada di benteng yang paling tinggi dan kokoh".*
  (QS An Nisaa :78)

- *Ilmu akan membuat hidup menjadi cerah, seni akan membuat hidup menjadi indah dan agama membuat hidup menjadi terarah.*

- *Ada dua hal yang harus anda lupakan : Kebaikan yang anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada anda. (Sai baba)*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pengatur semesta alam, yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta melimpahkan segala rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 1990-2004 ".*** Skripsi ini secara garis besar memuat tentang bagaimana mengelola Pajak Daerah secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Asli Daerah.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Ismai Ishak, M.Bus., Pd.D, selaku Dekan Fakultas Islam Indonesia.
2. Bapak Jaka Sriyana Dr., Drs., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indoonesia.
4. Karyawan-karyawati BPS Yogyakarta dan Gunungkidul terimakasih atas bantuan dan datanya.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Sobat-sobatku Green Kost sebagai awal aku berjuang di Jogja: Dwi Emon, Erwin Ucup, Seno to drug, Herry Bengkulu, Aphe " Rakha", Ipank Mansyur , Acca Aconk, Danang dan Charles
7. Adinda Deliana Eka Kusumawati yang telah memberi support dan doa selalu. Terima kasih atas kenangannya, jangan lupaiin mas ya....
8. Teman-teman KKN UNIT 110: Lela, Wiwin, Ika, Linda, Yanti, Dodo. Terima kasih atas kenangan terindah di Alam Nguntuk-untuk.
9. Cah2 EP: Nopha n Budi Cla-X, Sis Mogol, Gugun G, Indra Lupus "vespa ijo", Cholid, den mas wahyu slemania, Ira_one, Pajar "jarwo", Pitra, Hendi, Arman, Fika, Rini, Ina, Sari 03, Ipoey "captain jack", Hatta, Beny, Eko,Yuli, Mamad, gembong, Yadin, Andy "komeng', Fahmi serta seluruh rekan2 seperjuangan dalam panji2 EP 02, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu..Kalian adalah teman2 terbaikku, bersama kalian aku telah menemukan arti sebuah persahabatan dan kekompakan. Sukses slalu and bravo SEPAKBOLA EP..

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Karena keterbatasan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2006

Penulis,

Ardian Damar Sasono

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Pengesahan Ujian iv

Halaman Motto v

Halaman Persembahan vi

Halaman Kata Pengantar vii

Halaman Daftar Isi xi

Halaman Daftar Tabel xv

Halaman Daftar Gambar xviii

Halaman Abstrak xix

Halaman Daftar Lampiran xx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3.Tujuan dan Manfaat 7

1.3.1. Tujuan Penelitian 7

1.3.2. Manfaat Penelitian 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN 11

2.1.Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 11

2.2. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul 12

2.3. Kondisi Iklim 15

2.4. Batas Wilayah 15

2.5. Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul 16

2.6. Kependudukan 19

2.6.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 19

2.6.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk 21

2.7. Kondisi Sosial 22

2.7.1. Pendidikan 22

2.7.2. Kesehatan 23

2.7.3. Agama 24

2.7.4. Pariwisata 24

2.8. Keadaan Ekonomi 25

2.8.1. PBRB 25

2.8.2. PAD 26

2.8.3. Pendapatan Perkapita 28

2.8.4. Ketenagakerjaan 28

2.8.5. Pajak Daerah 29

BAB III KAJIAN PUSTAKA 31

3.1. Penelitian Wakhid Ismawan 31

3.2. Penelitian Dhian Pratita Mayasari 31

3.3. Penelitian Bayu Kurniawan 32

3.4. Penelitian Rina Widyastuti 33

3.5. Penelitian Jaka Sriyana 33

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 35

4.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah 36

4.2. Pengertian Keuangan Daerah 38

4.2.1. Sumber Keuangan Daerah 39

4.2.2. Dasar Hukum Keuangan Daerah 40

4.2.3. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 41

4.3. Pajak 42

4.3.1. Pengertian Pajak 42

4.3.2. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 44

4.3.3. Fungsi Pajak 45

4.3.3.1. Sumber Keuangan Daerah 45

4.3.3.2. Fungsi Mengatur 45

4.3.4. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat,
dan Pemungutannya 46
4.3.4.1. Menurut Golongannya 46
4.3.4.2. Menurut Sifatnya 46
4.3.4.3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 46
4.4. Pajak Daerah 49
4.4.1. Pengertian Pajak Daerah 49
4.4.2. Konsep Perpajakan Daerah 50
4.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 51
4.5.1. Definisi PDRB 51
4.5.2. Manfaat Data PDRB 53
4.6. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas 54
4.6.1. Efisiensi 54
4.6.2. Efektivitas 56
4.7. Hubungan Antara Variabel Dependen
dengan Independen 57
4.8. Hipotesis 58

BAB V METODE PENELITIAN 59
5.1. Data yang digunakan 59
5.2. Definisi Operasional Variabel 60
5.3. Metode Analisis Data 61

5.3.1. Uji Efisiensi 61

5.3.2. Uji Efektivitas 62

5.3.3. Metode Regresi Terkecil (OLS) 62

5.3.4. Metode Trend Least Square 64

5.4. Pemilihan Model Regresi 65

5.5. Uji Statistik 67

5.5.1. Uji t Statistik 67

5.5.2. Uji F Statistik 68

5.5.3. Kooefisien Determinasi (R^2) 69

5.6. Pengujian Asumsi Klasik 70

5.6.1. Autokorelasi 70

5.6.2. Multikolinearitas 72

5.6.3. Heteroskedastisitas 73

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 74

6.1. Uji Efektivitas 75

6.2. Uji Efisiensi 76

6.3. Analisis Regresi 78

6.3.1. Pemilihan Model Regresi 78

6.3.2. Uji Statistik 80

6.3.2.1. Uji t Statistik 80

6.3.2.2. Uji F Statistik 83

6.3.2.3. Kooefisien Determinasi (R^2) 84
6.3.3. Uji Asumsi Klasik 85
6.3.3.1. Autokorelasi 85
6.3.3.2. Multikolinearitas 86
6.3.3.3. Heteroskedastisitas 87
6.3.4. Interpretasi Analisis Hasil Regresi 87
6.4. Analisis Trend 89
BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI 92
7.1. Kesimpulan 92
7.2. Implikasi 93
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 97

2.9. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gunungkidul tahun 1995-2004 27
2.10. Pendapatan Perkapita Kabupaten Gunungkidul
tahun 2000-2004 (Rp) 28
2.11. Lapangan Kerja Menurut Lapangan Usaha
(dalam persen) 29
2.12. Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1990-2004 30
6.1. Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 1997-2004 76
6.2. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 1997-2004 77
6.3. Hasil Uji MWD 79
6.4. Hasil Pengujian secara Parsial 80
6.5. Uji Lagrahge Multiplier (LM) 86
6.6. Uji Mutikolinearitas 86
6.7. Uji White Heteroskedastisitas 87
6.8. Hasil perhitungan trend penerimaan pajak daerah
di Kabupaten Gunungkidul tahun 1999-2004 90
6.9. Prediksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2006-2010 91

DAFTAR TABEL

1.1. Penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2002-2004 6

2.1. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul 16

2.2. Potensi Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul Terhadap Luas Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta 16

2.3. Luas Wilayah serta Jumlah Desa Di Kabupaten Gunungkidul dirinci per kecamatan 18

2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 1995-2004 20

2.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 21

2.6. Jenis-jenis Sekolah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 23

2.7. Jenis-jenis Sekolah/Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Agama di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 23

2.8. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2003-2004 (dalam jutaan Rp) 26

DAFTAR GAMBAR

6.1. Uji Parameter Variabel PDRB 81

6.2. Uji Parameter Variabel jumlah wisatawan 82

6.3. Uji Parameter Variabel jumlah penduduk 83

6.4. Uji F- Statistik 84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I. Data Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Gunungkidul 1990-2004 97

II. Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997-2004 98

III. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997-2004 99

IV. Hasil Regresi Linier 100

V. Hasil Regresi Log Linier 101

VI. Hasil Uji Autokorelasi 104

VII. Hasil Uji MWD (Model lin-lin) 102

VIII Hasil Uji MWD (Model log-lin) 103

IX. Hasil Uji Multikolinearitas 105

X. Hasil Uji Heteroskedastisitas 107

XI. Prediksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2006-2010 108

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul tentang Efisiensi dan Efektifitas dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 1990-2004. Tujuan dari penelitian ini adalah (i) mengukur sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul, (ii) menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul. serta (iii) mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder berupa data time series selama periode 1990-2004. Data berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji efisiensi dan efektifitas, analisis regresi, serta uji trend. Berdasarkan hasil uji efisiensi diperoleh hasil rata-rata 4,36% serta uji efektivitas diperoleh hasil rata-rata 116,61% menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah sudah sangat efisien dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada tingkat α 5%, diperoleh koefisien regresi variabel independen PDRB sebesar 0,79, artinya jika PDRB naik sebesar satu satuan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,79 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi variabel independen jumlah penduduk sebesar 25,73, artinya jika jumlah penduduk naik sebesar satu satuan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,79 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Dengan menggunakan uji trend diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak daerah di tahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari hasil penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa di era otonomi daerah seperti sekarang ini setiap daerah dituntut untuk dapat lebih mengoptimalkan segala potensi yang ada diwilayahnya dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan global.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada prinsipnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi kesejahteraan, kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka baik jasmani maupun rohani. Pembangunan di segala bidang dalam skala yang berbeda-beda, ditunjang dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta pesatnya kemajuan teknologi seperti saat ini, akan membawa kehidupan manusia ke taraf yang lebih maju pula. Pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam Pemerintahan Orde Baru, peran pemerintah terlalu menonjolkan pembangunan dengan sistem perencanaan secara terpusat (sentralisasi), kendali pemerintahan dan pembangunan berada ditangan pemerintah pusat. Akibat dari penerapan sistem sentralisasi ini adalah semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya akan mematikan kemampuan, prakarsa dan daya kreativitas pemerintah daerah. Beban pemerintah pusat semakin berat serta semakin kompleksnya masalah yang dihadapi telah menambah sulit dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam merespon dinamika dan permasalahan yang dihadapi, hal ini ditambah lambatnya antisipasi pemerintah terhadap

gejala krisis ekonomi dan keuangan global. Gagalnya pemerintah dalam membaca perubahan dan berbagai kecenderungan global dalam bidang keuangan dan ekonomi ini merupakan sumbu awal terjadinya krisis ekonomi saat ini.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis.

Tujuan utama dari Kebijakan Desentralisasi adalah *pertama,* membebaskan pemerintah pusat dari bebab-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global. *Kedua,* daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah yang ada akan semakin kuat. Jadi peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam GBHN juga disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu antar sektor maupun

antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh tanah air.

Pembangunan daerah sendiri adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tertentu (Arsyad :298). Dalam pengertiaan diatas, yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kondisi dan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan melihat dan mengkaji potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya fisik secara daerah.

Dalam UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian diatas mengandung suatu implikasi bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan dan kekuasan yang lebih luas bagi pemerintah daerah (khususnya pada tingkat kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai kebijakan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di daerahnya masing-

masing. Jadi dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah setempat dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran publik di daerahnya, selain memperoleh alokasi dari sumber dana perimbangan dari pusat, juga dapat melakukan penggalian terhadap potensi-potensi yang ada didaerahnya (Pendapatan Asli Daerah), Peran pemerintah pusat adalah sebagai katalisator dan fasilitator. Otonomi daerah secara garis besar lebih berbasis pada kabupaten/kota dibandingkan pada propinsi, artinya bahwa kebijakan desentralisasi lebih diarahkan pada pemberian wewenang yang lebih luas pada kabupaten/kota. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kabupaten/kota ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan wewenang tersebut dilihat dari sisi keuangannya?

Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah/kebijakan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu ditempuh dengan cara:

1. Merencanakan dan menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dengan cara merevisi Perda - perda yang dipandang sudah tidak sesuai.
2. Mengintensifkan pemungutan/penagihan dari proyek pendapatan.
3. Mengintensifkan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi.

4. Menata manajemen BUMD secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat dikelola secara profesional yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada pemerintah daerah.
5. Menggali potensi pendapatan lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.
6. Mendirikan unit - unit perusahaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah.
7. Senantiasa berusaha meningkatkan dana perimbangan dari Pusat yaitu DAU dan DAK.

Pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana dengan adanya suatu manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik maka secara signifikan akan berdampak positif pula terhadap kemampuan daerah yang bersangkutan dalam rangka pembiayaan-pembiayaan publik. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dalam membentuk keuangan suatu daerah, PAD di Kabupaten Gunungkidul terbentuk dari 4 komponen yaitu berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, BUMD serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak daerah merupakan suatu elemen penting dalam memberikan sumbangsih terhadap keuangan suatu daerah (Pendapatan Asli Daerah). Di Kabupaten Gunungkidul sendiri di tahun 2004, penerimaan dari sektor pajak daerah memberikan sumbangan sebesar 14,08% dari total Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa penerimaan dari

sektor pajak dari tahun 2000-2004 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimana di tahun 2000 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 901.597.000 dan di tahun 2004 sebesar Rp 2.776.746.000, tetapi dalam prosentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun. Pada tahun 2000 sebesar 15.76%, tahun 2001 sebesar 15.02%, tahun 2002 sebesar 14.03%, tahun 2003 sebesar 17.29% dan tahun 2004 sebesar 14.08%.

TABEL 1.1.

Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000-2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (ribu)	Pendapatan Asli Daerah (ribu)	Prosentase Pajak Daerah terhadap PAD (%)
2004	2.776.746	19.715.647	14.08
2003	3.023.328	17.481.174	17.29
2002	1.892.344	13.486.859	14.03
2001	1.330.254	8.852.286	15.02
2000	901.597	5.719.379	15.76

Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Kabupaten Gunungkidul (berbagai terbitan/data diolah)

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya mengenai pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **"EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 1990-2004".**

1.2. Rumusan Masalah

Agar masalah tidak menyimpang dari apa yang diteliti maka masalah dibatasi. Beberapa masalah penlitian yang akan dibahas adalah:

1. Sejauh mana efisiensi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul?
2. Sejauh mana efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana pengaruh PDRB, jumlah wisatawan, serta jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana kecenderungan penerimaan pajak daerah di tahun-tahun mendatang di Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul?
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul?
3. Untuk mengetahui arah perkembangan dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti, antara lain:

1. Bagi Ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan suatu kajian serta sumber referensi dalam bidang keuangan daerah, khususnya mengenai sektor pengelolaan penerimaan daerah serta memperkaya penelitan-penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian berikutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini bagian keuangan Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, masukan dan analisis dalam menentukan kebijaksanaan keuangan daerah dimasa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan referensi serta membantu memberikan suatu pengetahuan dan kajian mengenai kondisi keuangan daaerahnya khususnya di Kabupaten Gunungkidul.
4. Bagi Mahasiswa/peneliti, sebagai wujud penerapan dan pengamalan ilmu yang telah didapatkan pada masa kuliah, yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.5. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuh bab, dimana dalam setiap babnya akan dirinci menjadi sub-sub bab yang relevan serta terdapat keterkaitan dengan pembahasan bab secara keseluruhan. Adapun secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi mengenai gambaran dan uraian umum daerah/subyek penelitian yakni Kabupaten Gunungkidul.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan acuan, sehingga akan diketahui hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang ada/sebelumnya.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi dan mendasari penelitian, sehingga dapat mendukung serta searah dengan penelitian yang dibahas. Dimana akan disimpulkan suatu hipotesis permasalahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Untuk mempercepat proses pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Daerah

   Terwujudnya Kabupaten Gunungkidul sebagai Daerah Pengembangan Pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta Pariwisata yang berbudaya dengan didukung pemerintah yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas menuju kemandirian serta peningkatn taraf hidup masyarakat.

2. Misi pembangunan Daerah

   Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka disusun misi sebagai berikut:

   a. Pemantapan sistem dan kelembgan Pemerintah Daerah serta peningkatan kemampuan aparatur
   b. Pemantapan sistem dan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat.
   c. Penegakan hukum
   d. Peningkatan kemampuan keuangan daerah

BAB V. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik serta dalam pengujiannya menggunakan bantuan computer.

BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini berisi mengenai simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya.sedangkan Implikasi akan muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

e. Penyediaan prasarana dasar yang memadai

f. Pengembangan sumber daya pertanian, pariwisata,industri kecil dan menengah, berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pedesaan.

g. Penciptaan iklim yang kondusif untuk berkembngnya dunia usaha.

h. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

i. Peningkatan peran serta masyarakat.

j. Peningkatan kerjasama antar daerah.

k. Peningkatan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

l. Peningkatan iman dan taqwa serta pelestarian budaya dan pelestarian berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila.

2.2. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul adalah salah satu kabupaten dari 5 (lima) Kabupaten/kotamadya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Gunungkidul adalah Wonosari. Kabupaten Gunungkidul terletak pada $11^{0}21^{0}$ sampai $110^{0}50^{0}$ bujur timur dan 7^{0} 46^{0} sampai $8^{0}09^{0}$ lintang selatan. Keadaan topografi sebagian besar berbukit-bukit dan sebagian lagi dataran. Selain itu kondisi tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul mempunyai berbagai macam corak dan jenis. Hal ini berdasarkan pada ketinggian tanah diukur dari permukan air laut.

Atas dasar topografi, jenis batuan, jenis tanah, ketinggian wilayah, dan keadaan hidrologi/sumber air, wilayah Kabupaten gunungkidul dibagi menjadi tiga zone wilayah sebagai berikut:

a) Zone utara atau Zone Batur Agung; meliputi wilayah Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong Utara. Bentuk wilayah berbukit, bergunung, tinggi dari permukaan laut 200-700 meter diatas permukan air laut, jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen tufan. Kisaran curah hujan per tahun 2000-25000 mm, memiliki sungai di atas tanah dan banyak ditemukan sumber air. Wilayah ini potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan , buah-buahan, dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.
b) Zone Tengah atau Zone Ledok Wonosari, meliputi wilayah Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong Tengah dan Semanu bagian Utara. Bentuk wilayah landai sampai bergelombang, ketinggian dari permukaan air laut 150-200 meter diatas permukaan laut. Jenis tanh didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batuan kapur. Kisaran curah hujan per tahun 1800-2000 mm, terdapat sungai permukaan, sumber air dan diduga terdapat sungai bawah tanah. Potensial untuk tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman kayu-kayuan, budidaya perikanan darat (telaga) dan perikanan tangkap serta budidaya ternak.

c) Zone Selatan atau Zone Gunung Seribu, meliputi wilayah Kecamatan Purwosari, panggang, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu Selatan, dan Ponjong Selatan. Bentik wilayah berbukit-bukit, tinggi dari permukaan laut 0-300 meter diatas permukaan laut, jenis tanah didominasi oleh tanah latosol dan mediteran merah dengan bahan induk batuan kapur. Di zone ini banyak ditemukan sungai-sungai bawah tanah. Potensial untuk tanman lahan kering)padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, srikaya, sirsak, dll), budidaya perikanan perairan darat dan perikanan tangkap serta untuk usaha budidaya ternak (pembibitan dan penggemukan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEN/2004 Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan *Karst* Gunungsewu dan Pacitan Timur, untuk Kabupaten Gunungkidul, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan *karst* adalah kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan *karst* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.3. Kondisi Iklim

Curah hujan rata-rata Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2004 sebesar 1384 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.

Kelembaban Nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80%-85%. Kelembaban ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September. Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata adalah $27,7^0$ C , suhu minimum $23,2^0$ C serta suhu maksimum $32,4^0$ C

2.4. Batas Wilayah

Kabupaten Gunungkidul beribukota Wonosari, dimana jarak pusat kota Wonosari dengan Ibukota DIY (Yogyakarta) ± 40 Km, yang dapat ditempuh menggunakan kendaran bermotor selama ± 1 jam. Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administratif dapat dilihat pada tabel berikut: (tabel 2.1)

TABEL 2.1.

Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Bagian/sebelah	Berbatasan dengan
(1)	(2)
1. Barat	Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Utara	Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
3. Timur	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah
4. Selatan	Samudra Indonesia

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul

2.5. Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun luas wilayahnya hampir separo dari keseluruhan luas wilayah Propinsi DIY. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 Km^2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun perbandingan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten lain di wilayah Propinsi DIY, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2.

Potensi Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul Terhadap Luas Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Kabupaten/ Kotamadya	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. Kabupaten Kulonprogo	586,28	18,40
2. Kabupaten Bantul	506,85	15,91
3. Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	46,63
4. Kabupaten Sleman	574,82	18,04
5. Kotamadya Yogyakarta	32,50	1,02
Propinsi DIY	3.185,81	100,00

Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas wilayah 1.485,36 Km^2 atau 46,63% dari total luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan wilayah yang paling sempit dengan luas wilayah hanya 32,50 Km^2 atau 1,02% luas wilayah DIY (atau kurang dari setengah luas wilayah Kecamatan Wonosari seluas 75,51 Km^2). Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki luas total wilayah 3.185,81 Km^2 (tabel 2.2.)

Luas total Kabupaten Gunungkidul terbagi ke dalam 18 kecamatan, dimana tentunya antara satu kecamatan dengan kecamatan lain tidaklah sama. Untuk memperjelas dan mengetahui mengenai luas wilayah Kabupaten Gunungkidul per kecamatan akan ditampilkan ke dalam tabel berikut: (tabel 2.3.)

TABEL 2.3.

Luas Wilayah serta Jumlah Desa
Di Kabupaten Gunungkidul dirinci
per kecamatan

Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Desa	Persentase terhadap luas Kabupaten Gunungkidul (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Panggang	99,80	6	6,72
2. Purwosari	71,76	5	4,83
3. Paliyan	58,07	7	3,91
4. Saptosari	87,83	7	5,91
5. Tepus	104,91	5	7,06
6. Tanjungsari	71,63	5	4,82
7. Rongkop	83,46	8	5,62
8. Girisubo	94,57	8	6,37
9. Semanu	108,39	5	7,30
10. Ponjong	104,49	11	7,03
11. Karangmojo	80,12	10	5,39
12. Wonosari	75,51	14	5,08
13. Playen	105,26	13	7,09
14. Patuk	72,04	11	4,85
15. Gedangsari	68,14	7	4,59
16. Nglipar	73,87	7	4,97
17. Ngawen	46,59	6	3,14
18. Semin	78,92	10	5,31
Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	144	100,00

Sumber: Gunungkidul dalam angka 2004, BPS Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul mempunyai total luas wilayah 1.485,36 Km^2, dimana terbagi kedalam 18 Kecamatan serta 144 desa. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 108,39 Km^2 atau 7,30% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Kecamatan Ngawen merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 46,59 Km^2 atau 3,14% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul.

2.6. Kependudukan

2.6.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk besar merupakan potensi pembangunan yang menjanjikan, tetapi penduduk yang besar bukan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dapat menjadi bencana terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan

Penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan registrasi pertengahan tahun 2004 berjumlah 755.941 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Wonosari dengan 78.762 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwosari yaitu sebanyak 22.143 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) kurang dari 100, dimana jumlah penduduk perempuan dibagi jumlah penduduk laki-laki jika dikalikan 100% hasilnya akan selalu dibawah angka 100. Rata-rata jumlah penduduk per keluarga di Kabupaten Gunungkidul dihuni oleh hampir 5 jiwa. Menurut data tahun 2004, Kecamatan Gedangsari merupakan kecamatan dengan rata-rata penduduk per keluarga terbesar yaitu 5,39 jiwa, sedangkan Kecamatan Karangmojo merupakan kecamatan dengan rata-rata penduduk per keluarga terendah yaitu sebesar 4,30 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2004 cenderung menurun,

banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain program KB, angka kematian (*mortalitas*) > kelahiran (*fertilitas*) dan migrasi.

Dibawah ini disajikan jumlah penduduk serta tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 1995-2004:

TABEL 2.4.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1995-2004

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1995	354.509	370.176	724.685	-
1996	356.999	372.656	729.655	0,69
1997	358.806	374.358	733.164	0,48
1998	360.364	375.929	736.293	0,43
1999	361.917	377.342	739.259	0,40
2000	363.840	379.442	743.282	0,54
2001	365.439	381.012	746.451	0,43
2002	367.307	382.568	749.875	0,46
2003	368.760	384.248	753.008	0,42
2004	370.298	385.643	755.941	0,39

Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Gunungkidul (berbagai terbitan)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 1995 jumlah penduduk tercatat sebanyak 724.685 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 354.509 jiwa dan jumlah perempuan 370.176 jiwa. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 755.941 jiwa, dimana jumlah laki-laki 370.298 jiwa dan jumlah perempuan 385.643 jiwa. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan sebesar 4,13%. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 1996 pertumbuhan penduduk paling tinggi

dengan persentase yaitu 0,68% sedangkan tahun 2004, pertumbuhan penduduk terendah dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,38%

2.6.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul dan penyebarannya akan disajikan ke dalam tabel berikut:

TABEL 2.5.

Kepadatan Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2004

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Panggang	99,80	28.244	283
2. Purwosari	71,76	22.143	309
3. Paliyan	58,07	32.167	554
4. Saptosari	87,83	37.097	422
5. Tepus	104,91	38.921	371
6. Tanjungsari	71,63	28.887	403
7. Rongkop	83,46	32.314	387
8. Girisubo	94,57	27.357	289
9. Semanu	108,39	58.817	543
10. Ponjong	104,49	56.535	541
11. Karangmojo	80,12	56.636	707
12. Wonosari	75,51	78.762	1043
13. Playen	105,26	59.934	569
14. Patuk	72,04	31.657	439
15. Gedangsari	68,14	40.337	592
16. Nglipar	73,87	35.208	477
17. Ngawen	46,59	36.067	774
18. Semin	78,92	54.871	695
Kabupaten Gunungkidul	1485,36	755.941	509

Sumber: Gunungkidul dalam angka 2004, BPS Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tiap kecamatan di Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Kecamatan Wonosari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 1043 jiwa per Km^2, sedangkan Kecamatan

Panggang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu 283 jiwa per Km^2. Secara keseluruhan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1485,36 Km^2 serta jumlah penduduk 755.941 jiwa, mempunyai kepadatan penduduk 509 jiwa per Km^2. Meskipun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul masih terendah dibanding kepadatan penduduk kabupaten/kotamadya lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun minimnya pendapatan di Kabupaten Gunungkidul menyebabkan terjadi ketimpangan yang tinggi. Ketergantungan penduduk pada sektor pertanian banyak timbul permasalahan terutama ketika musim kemarau datang, sehingga akan memperulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi (tabel 2.5.)

2.7. Kondisi Sosial

2.7.1. Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemajuan suatu negara atau daerah adalah tingkat pendidikan penduduk. Pendidikan merupakan salah satu variabel pendukung peningkatan produktivitas kerja. Salah satu faktor yang mendukung kemajuan tingkat pendidikan adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang mendukung, seperti jumlah sekolah, ruang kelas, dan jumlah guru (kaitannya dengan persentase/rasio antara jumlah guru dan murid). Untuk mengetahui jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.6.

Jenis-jenis Sekolah di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2004

No	Jenis Sekolah	Jumlah Unit	Jumlah Ruang kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	TK	541	639	11.327	1.259	1:9
2.	SD	506	3.298	62.998	4.101	1:15
3.	SMP	99	826	25.549	2.149	1:12
4.	SMA	28	276	6.573	822	1:8
5.	SMK	23	248	8.996	847	1:11
6.	PT	4	-	704	82	1:9

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul

TABEL 2.7.

Jenis-jenis Sekolah/Lembaga Pendidikan di Lingkungan
Departemen Agama di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004

No	Jenis Sekolah	Jumlah Unit	Jumlah Ruang kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BAN/BAS	412	450	7.362	839	1:9
2.	MIN/MIS	75	448	5.401	461	1:12
3.	MTsN/MTsS	28	84	4.797	548	1:8
4.	MAN/MAS	5	15	709	118	1:6

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Gunungkidul

2.7.2. Kesehatan

Dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah terus menggalakkan pembangunan di bidang kesehatan dengan tujuan agar lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan mudah. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2004 di Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat 1 Rumah Sakit Umum (RSU) milik

pemerintah serta 1 Rumah Sakit milik swasta. Selain itu di Kabupaten Gunungkidul juga terdapat klinik bersalin berjumlah 6 buah (dikelola swasta), Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah hampir 1.457 buah, Apotik sebanyak 6 buah serta Polindes 27 buah. Sarana Kesehatan lain yang disediakan Pemerintah untuk menjangkau masyarakat umum agar mendapat pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya puskesmas-puskesmas yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang mencapai angka 139 buah (termasuk puskesmas pembantu).

2.7.3. Agama

Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 755.941 jiwa pada tahun 2004, mayoritas memeluk Agama Islam sebesar 716.783 jiwa (95, 36%), sedangkan pemeluk Agama Katholik sebesar 16.659 jiwa (2,22%), diikuti Agama Kristen Protestan 14.792 jiwa (2,04%), Agama Hindu 1.962 jiwa (0,25%), Agama Budha 443 jiwa (0,10%)

2.7.4. Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu sektor andalan masa depan yang penting dan strategis. Kabupaten Gunugkidul sebagai pendukung daerah tujuan wisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi wisata yang cukup besar, dengan titik berat pada obyek wisata alam Pantai Baron, Kukup, Drini, Krakal, Sundak, Siung,

Wediombo, Sadeng, Ngrenehan, Ngobaran, Girijati, Parangendok, dan Gupit. Adapun Peninggalan sejarah dan purbakala antar lain Gunung Gambar, Wisata Goa Seropan, Maria Tritis, Cerme, Paesan, Balong, dan Langse. Wisata minat khusus antara lain kawasan *karst*, situs *megalithikum*, *caving*, *climbing*, *tracking* dan *otomotif.*

2.8. Keadaan Ekonomi

2.8.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2004 terutama dari sektor sektor pertanian yaitu mencapai angka 35,90% dari total nilai PDRB. Besarnya sektor pertanian dalam menyumbang PDRB terbesar merupakan refleksi dari luasnya lahan yang dimiliki dan mata pencaharian terbesar masyarakat Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai petani.

Kecilnya peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam memberikan kontribusi PDRB (hanya 3%), sementara secara nyata potensinya besar, menunjukkan sumber daya alam potensial Kabupaten Gunungkidul yaitu bahan-bahn galian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan, sektor pertambangan dan penggalian kurang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kurang mampu memberi upah yang memadai dan kurang mampu menarik pajak serta retribusi yang efektif.

Dibawah ini disajikan tabel mengenai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Gunungkidul tahun 2003-2004 :

TABEL 2.8.

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2004 (dalam jutaan Rp)

NO	JENIS LAPANGAN USAHA	JUMLAH		PERSENTASE	
		2003	2004	2003	2004
1.	Pertanian	1.022.878	1.026.086	40,49	39,26
2.	Pertambangan & Penggalian	58.051	56.773	2,30	2,17
3.	Industri Pengolahan	299.095	309.914	11,84	11,86
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	10.645	12.667	0,42	0,48
5.	Bangunan dan Konstruksi	180.703	191.552	7,15	7,33
6.	Perdagangan, hotel & Restoran	352.235	370.589	13,94	14,18
7.	Angkutan dan Komunikasi	160.145	174.445	6,34	6,68
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	103.508	113.906	4,10	4,36
9.	Jasa dan Lainnya	339.259	357.336	13,43	13,67
	JUMLAH	2.526.516	2.613.269	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (berbagai terbitan)

2.8.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengenal lebih dekat lagi struktur PAD yang dimiliki, sehingga dapat mengetahui sumber PAD yang

berpotensial maupun tidak potensial, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menitik beratkan pada sumber-sumber PAD yang potensial dan berusaha menggalinya agar lebih optimal, sedangkan untuk sumber-sumber PAD yang kurang potensial , Pemerintah Daerah perlu melakukan koreksi dan mengkaji lebih dalam tentang sebab dan kendala yang menyebabkan sumber itu kurang potensial.

Selama periode 1995-2004, PAD cenderung mengalami peningkatan, meskipun dilihat dari pertumbuhannya dari tahun 1995-2004 cenderung labil naik turun. Penurunan pada tahun 1998-1999 disebabkan karena adanya krisis moneter yang puncaknya terjadi pada tahun-tahun tersebut, sedangkan penurunan pada tahun 1999-2000 disebabkan karena adanya perubahan perhitungan tahun yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Besarnya pertumbuhan penerimaan PAD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2.9.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 1995-2004

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD (dalam ribuan Rp)	Pertumbuhan (%)
1995	2.622.789	-
1996	2.956.810	12.74
1997	3.578.071	21.01
1998	4.473.470	25.02
1999	5.409.514	20.92
2000	5.719.379	5.73
2001	8.852.286	54.78
2002	13.486.859	52.35
2003	17.481.174	29.62
2004	19.715.647	12.78

Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Kabupaten Gunungkidul (berbagai terbitan)

2.8.3. Pendapatan Perkapita Kabupaten Gunungkidul

Pendapatan perkapita didapat dari pembagian antara jumlah PDRB dari seluruh sektor dibagi dengan jumlah Penduduk. Pada tahun 2001 jumlah pendapatan perkapita mencapai 3.171.144,52 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,94 % dengan tahun sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 3.080.650,41. Pada tahun 2002 Pendapatan Perkapita Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan sebesar 3.259.619,27 atau meningkat sebesar 2,79 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.171.144,52 pada tahun 2001. Data mengenai perkembangan pendapatan Perkapita dapat dilihat pada tabel 2.10. dibawah ini:

TABEL 2.10.

Pendapatan Perkapita Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2000-2004(Rp)

Tahun	Pendapatan Perkapita
2000	3.080.650,41
2001	3.171.144,52
2002	3.259.619,27
2003	3.355.231,29
2004	3.456.974,82

Sumber: BPS Gunungkidul

2.8.4. Ketenagakerjaan

Struktur ekonomi Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian yang tercermin dari dominannya sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja yakni mencapai 73, 84% pada tahun 2004. Disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap 9,56% serta sektor industri dan jasa-jasa masing-masing 4,55% dan 5,89% (tabel 2.11.)

TABEL 2.11.

Lapangan Kerja Menurut Lapangan Usaha
(dalam persen)

No	Lapangan Kerja	2002	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian	75,57	73,89
2.	Industri	3,69	4,55
3.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,65	9,56
4.	Jasa-jasa	5,79	5,89
5.	lainnya	7,30	6,10

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul (berbagai terbitan)

2.8.5. Pajak Daerah

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam melakukan pemungutan pajak. Disamping itu pemungutan pajak dari rakyat pada hakekatnya juga digunakan untuk kesejahteran rakyat itu sendiri melalui pembiayaan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Di Kabupaten Gunungkidul penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah mendominasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dibawah ini disajikan tabel yang menunjukkan besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 1990-2004 (tabel 2.12.)

TABEL 2.12.

Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1990-2004

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (ribu Rp)	% terhadap PAD	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (ribu Rp)	% terhadap PAD
1990	59.746,00	5.11	1998	807.150,00	18.04
1991	57.681,00	4.16	1999	982.690,00	18.17
1992	69.552,00	4.20	2000	901.597,00	15.76
1993	87.619,00	4.64	2001	1.330.254,00	15.02
1994	103.276,00	4.83	2002	1.892.344,00	14.03
1995	371.694,00	14.17	2003	3.023.328,00	17.29
1996	557.462,00	18.85	2004	2.776.746,00	14.08
1997	635.773,00	17.77			

Sumber: Gunungkidul dalam angka, BPS Kabupaten Gunungkidul (berbagai terbitan/data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan dari tahun 1990-2004 besarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Persentase terbesar dicapai pada tahun 1996 yaitu 18,85% dan terkecil sebesar 4,16% pada tahun 1991. pada saat terjadi puncak krisis ekonomi di Indonesia persentase penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul terhadap PAD masih berkisar diatas 17% yaitu 17,77% namun sejak tahun 2000 turun menjadi 15,76%, hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan perhitungan tahun, yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Tahun 2001 dimana awal diberlakukannya otonomi daerah, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15,02% serta 14,03% di tahun 2002. kemudian meningkat lagi menjadi 17,29% pada tahun 2003. tetapi peningkatan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2004 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi 14,08%.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Dengan mengacu dan mengkaji pada penelitian-penelitian sebelumnya baik yang sejenis maupun berbeda permasalahan yang dibahas, maka kajian pustaka yang akan dijadikan pertimbangan atau konsep-konsep dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Ismawan (2004), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bangka (1986-2002). Alat analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda dengan uji klasik. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah perusahaan, serta produksi logam timah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (i) variabel laju inflasi tidak berpengaruh signifikant terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bangka. Hal ini disebabkan karena kenaikan laju inflasi tersebut tidak mencerminkan kenaikan pajak daerah secara riil. (ii) Hasil produksi logam timah berpengaruh signifikant negatif terhadap peneriman pajak daerah dari produksi timah. (iii) Jumlah industri merupakan faktor yang paling berpengaruh cukup besar terhadap pajak daerah di Kabupaten Bangka. (iv) Dalam analisis hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen disebutkan bahwa PDRB dan jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Bangka

Mayasari (2005), menganalisis tentang Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 1999-

2003. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kontribusi dan metode *Trend Least Square*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi retribusi terminal dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selain itu berdasarkan dari hasil perhitungan analisis *trend least square* dapat diperkirakan bahwa penerimaan dari retribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul pada tahun-tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan. Sehingga dengan digunakan analisis ini diharapkan akan mempermudah dalam menentukan target penerimaan dari rettribusi terminal di Kabupaten Gunungkidul dimasa yang akan datang.

Kurniawan (2003), melakukan penelitian tentang pengaruh Penerimaan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Kalimantan Timur tahun 1987-2001. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji elastisitas setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikkan 50% terbukti peningkatan PAD dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilain sisi peningkatan PAD sebesar 50% akan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Dari analisis ini juga diketahui bahwa pengujian (Uji f) didapatkn nilai *chi square* hitung nilainya lebih besar dari f tabel ($f_{hit} > f_{tab}$). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pertumbuhan di Propinsi Kalimantan Timur (PDRB)

Widyastuti (2003) melakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Surakarta tahun 1985-2000. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: besarnya PDRB riil perkapita, jumlah wisatawan asing, jumlah wisatawan nusantara, jumlah penduduk dan jumlah penginapan di Kota Surakarta. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan uji klasik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel independen secara individual menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan nusantara tidak terbukti hipotesisnya. Hal ini disebabkan karena wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Surakarta pada umumnya hanya wisatawan dalam kota (penduduk Kota Surakarta) dan wisatawan tersebut tidak tinggal lama atau menginap, sehingga hal ini tidak mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Sriyana (1999) melakukan kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah. Dari penelitiannya disebutkan bahwa besar-kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat mupun daerah. Model yang digunakan peneliti yaitu: PAD = F (Yk,Pd)

Pajak = F (Yk,Pd)

Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa variabel pendapatan perkapita (Yk) dan jumlah penduduk (Pd) merupakan variabel yang cukup penting dalam menentukan PAD dan pajak baik untuk daerah tingkat I maupun tingkat II. Dengan demikian peningkatan pajak dan PAD masing-masing daerah di

Indonesia, selain disebabkan oleh adanya kebijakan reformasi perpajakan juga ditentukan oleh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, khususnya penduduk yang bekerja. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dengan reformasi perpajakan yang ditandai dengan lahirnya UU Perpajakan yang tercakup dalam UU No 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak penghapusan komponen pendapatan daerah, namun juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan penerimaan daerah (peningkatan kemandirian pembiayaan bagi pemerintah daerah). Dampak lain dari adanya reformasi perpajakan adalah peningkatan efisiensi ekonomi nasional sehingga akan merangsang investor untuk menanamkan modal usahanya di masing-masing daerah. Dalam jangka panjang peningkatan investsi akan berdampak pada peningkatn volume kegiatan ekonomi, sehingga secara otomatis kan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pelaksanaan pembangunan daerah pada hakekatnya tidak lepas dan searah dengan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanan pembangunan daerah selain diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat juga sekaligus menciptakan pemerataan, serta menumbuhkan pola hidup sederhana sehingga kesenjangan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun semakin kecil. Selain itu dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada segenap investasi dan potensi kebijakan daerah, perlu diprioritaskan juga kepada golongan ekonomi lemah.

Dalam UU No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Oleh karenanya pemerintah dituntut dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam suatu kerangka pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pemerintah yang baik juga harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan yang ada, misalnya dalam perekonomian pasar sering terjadi monopoli. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dan eksternalitas negatif demi terpacumya suatu efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi, dan pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sebenarnya mengandung arti dan makna yang berbeda. Cakupan pembangunan ekonomi lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi biasanya kedua istilah tersebut digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan ekonomi mencangkup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya

produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, serta perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Rosyidah, 2006: 27)

Arsyad, (1997: 274) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang ekonomi dalam wilayah tertentu. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bertsangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal/daerah. Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasaan antardaerah, yang tidak jarang akan mengarah pada ketidakstabilan politik suatu negara. Oleh karenanya campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah

mempunyai manfaat yang sangat tinggi, disamping mencegah jurang kemakmuran antardaerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat terutama kestabilan politik, padahal seperti kita ketahui kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara yang mantap dan dinamis (Arsyad, 1997:274-283).

Pembangunan ekonomi daerah memiliki sasaran fundamental yang ingin dicapai oleh masing-masing daerah, antara lain:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatnya pendapatan perkapita.
3. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

(Rosyidah, 2006: 29-30)

Dari pengertian diatas, antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya pembanguan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.

4.2. Pengertian tentang Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai suatu kebijakan dalam mengelola keuangannya yang termuat dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga dari hal ini dapat diketahui kondisi keuangan suatu daerah apakah mengalami seimbang, surplus atau defisit keuangan. Disamping itu kinerja Pemerintahan Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

4.2.1 Sumber Keuangan Daerah

Adapun sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Bagian Laba Usaha Milik Daerah

d. Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya

3) Dana Perimbangan, yang terdiri dari:

a. Bagi hasil Pajak

b. Bagi Hasil Bukan pajak

c. Dana Alokasi Umum

d. Dana Alokasi Khusus

e. Penerimaan Lainnya yang Sah

4) Pinjaman Pemerintah Daerah, pinjaman dapat berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri

4.2.2. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, juga berpedoman pada dasar-dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD.

4.2.3. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri (pengeluaran dan pendapatan). Adapun tujuan pengelolaan keuangan daerah: (Devas, dkk, 1989: 279-280)

1. Tanggung Jawab (*Accountability*)

   Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab adalah mencangkup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan serta memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

   Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kejujuran

   Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

4. Daya Guna (*Efficiency*) dan Hasil Guna (*Effectiveness*)

   Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncankan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

   Petugas keuangan Pemerintah Daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

4.3. Pajak

4.3.1. Pengertian Pajak

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dibawah ini terdapat berbagai definisi mengenai pajak:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir/rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Selanjutnya menurut S.I Djajadiningrat, Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Tjahjono, 1997: 2-3)

Dr. Soeparman Soemahamidjaja juga berpendapat bahwa pajak berdasarkan Azaz Gotong Royong dimana beliau menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Waluyo, 2005:3)

4.3.2. Syarat-syarat pemungutan pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri Into The Nature and Cause of Tthe Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: (Waluyo, 2005: 13)

1) Persamaan dan keadilan (*Equality and Equity*)

   Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai manfaat yang diterima.

2) Kepastian Hukum (*Certainty*)

   Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karenanya, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran

3) Kelayakan *(Convenience of payment)*

   Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4) Faktor Ekonomi (*Economic of Collection*)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4.3.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu: sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*).

4.3.3.1.Sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara yaitu bahwa fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber peneriman negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

4.3.3.2. Fungsi mengatur atau *non budgetair* (*regularend*)

Yaitu kewenangan dan usaha pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Dalam fungsi mengatur ini, pemungutan pajak digunakan untuk:

a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial
b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. (Tjahjono, 1997: 4-6)

4.3.4. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

4.3.4.1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

4.3.4.2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak

   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

4.3.4.3. Menurut Pemungut dan pengelolanya

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

   Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Jenis pajak daerah ada 2 macam yaitu:

(i) Pajak Propinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(ii) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel dan Restoran

Pungutan daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan .

b. Pajak Hiburan

Pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

c. Pajak Reklame

Pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

d. Pajak Penerangan Jalan

Pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan galian Golongan C sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pungutan daerah atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

(Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul)

4.4. Pajak Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

4.4.1. Pengertian Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Selain itu pajak dapat diartikan sebagai:

a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri.

b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

c) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah, dibebani pungutan oleh Pemerintah Pusat

4.4.2. Konsep Perpajakan Daerah (Pandapatan Daerah)

Adapun konsep dari perpajakan daerah antara lain adalah sebagai berikut: (Halim, 2004 : 86-87)

1. Kecukupan dan elastisitas

   Yaitu Penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar, sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan

2. Pemerataan

   Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya

3. Kesepakatan Politis

   Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan niai-nilai yang berlaku pada masyarakat pada suatu daerah.

4. Distorsi pajak terhadap perekonomian

   Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan dapat mengurangi/mendorong kegiatan produksi dan investasi. Segi efisiennya adalah pungutan yang mendorong kegiatan perekonomian.

4.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

4.5.1. Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. (i) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan (ii) PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun dasar 1993 dan 2000.

Data PDRB dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu:

a) Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 kelompok usaha yaitu: (i) Pertanian, (ii) Pertambangan dan Penggalian, (iii) Industri Pengolahan, (iv) Listrik, Gas, dan Air Bersih, (v) Bangunan, (vi) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (vii) Pengangkutan dan Komunikasi, (viii) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, (ix) Jasa-jasa.

b) Menurut pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah, pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini mencangkup juga penyusutandan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha)

c) Menurut Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok, dan ekspor netto di suatu wilayah pad suatu periode tertentu (ekspor neto merupakan ekspor netto dikurangi impor).

(BPS Kabupaten Gunungkidul)

4.5.2. Manfaat Data PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat data PDRB antara lain: (BPS kabupaten Gunungkidul)

a) PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

b) PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

c) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

d) Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran yang

besar menunjukkan basis perekonomian yang mendominasi perekonomian wilayah tersebut.

e) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

f) PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

4.6. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan pajak daerah adalah melalui intensifikasi pajak daerah , yaitu upaya memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui: peningkatan efisiensi dan efektivitas pajak daerah.

4.6.1. Efisiensi

Efisiensi mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Efisiensi pada sektor swasta (*private sector efficiency*)

   Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input dan output yaitu rasio dari output dan input. Dari konsep ini dapat dijelaskan bahwa suatu kegiatan dikatakan lebih efisien jika menggunakan input (biaya) yang lebih sedikit tetapi output yang dihasilkan sama atau memperoleh hasil yang lebih besar sedangkan input yang digunakan sama.

2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*)

Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian sasaran, dalam hal ini adalah pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Atau sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya akan menghasilkan hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu akan menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. (Supriyanto, 2004: 24)

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik. (Halim, 2004 : 134)

Persentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu: (Mayasari, 2005: 55)

a) Lebih dari 100% → tidak efisien

b) Antara 90% - 100% → kurang efisien

c) Antara 80% - 90% → cukup efisien

d) Antara 60% - 80% → efisien

e) Kurang dari 60% → sangat efisien

4.6.2. Efektivitas

Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapi tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.(Devas, dkk, 1989: 279-280)

Pengukuran efektivitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 %, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.(Halim, 2004 : 135)

Efektivitas sebagai salah satu indikator kinerja terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari perhitungan realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan. Ada beberapa tingkatan persentase efektivitas kinerja, yaitu: (Mayasari, 2005: 58)

a) Lebih dari 100% → sangat efektif
b) Antara 90% - 100% → efektif
c) Antara 80% - 90% → cukup efektif
d) Antara 60% - 80% → kurang efektif
e) Kurang dari 60% → tidak efektif

4.7. Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

4.7.1. Penerimaan pajak daerah dan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Dengan adanya PDRB yang besar maka secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor pajak daerah.

4.7.2. Penerimaan pajak daerah dan jumlah wisatawan

Besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran serta pajak keramaian atas suatu hiburan. Hal ini didukung dengan letak daerah penelitian yang strategis sebagai daerah wisata.

4.7.3. Penerimaan pajak daerah dan jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang besar, khususnya penduduk sebagai wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu daerah. Misal: pajak penghasilan (PPh). Jadi dengan semakin banyaknya penduduk, khususnya penduduk yang telah bekerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

4.8. Hipotesis

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang dicari atau yang ingin dipelajari

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, serta tujuan dari penelitian, maka dituliskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Efisiensi pengelolaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

b) Efektivitas pengelolaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peneriman pajak daerah.

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.

d) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.

e) Jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.

f) Penerimaan pajak daerah di tahun-tahun mendatang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Data yang digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakan dan analisis data sekunder. Pendekatan Kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil teori-teori umum dari berbagi literatur maupun studi empiris untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data runtut waktu (*Time Series*). Observasi terdiri dari 15 tahun pada Kabupaten Gunungkidul selama periode 1990-2004. Data tersebut berupa laporan penerimaan keuangan daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari:

1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
2) Badan Pusat Statistik Indonesia
3) Setda Kabupaten Gunungkidul (bagian pembangunan)

5.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini beberapa hal menyangkut masalah yang ada didefinisikan sebagai berikut :

1) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peneriman pajak daerah yang dinyatakan dalam Y. Penerimaan pajak daerah adalah penerimaan kas pendapatan dari sektor pajak daerah yang diperoleh dari pemungutan terhadap wajib pajak dalam rangka untuk pembiayaan pembangunan daerah.
2) Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah:
   a) PDRB (X1) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk jutaan Rp per tahunnya dengan tahun dasar 1993.
   b) Jumlah Wisatawan (X2) merupakan banyaknya wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Gunungkidul.
   c) Jumlah Penduduk (X3) adalah jumlah keseluruhan orang di suatu daerah/wilayah tertentu, pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam jiwa per tahun.

5.3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.

1) Metode Analisis Kualitatif adalah suatu metode mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang sifatnya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan lengkap serta tidak menggunakan rumus.
2) Metode Analisis Kuantitatif adalah suatu metode mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang menggunakan rumus dengan menggunakan data-data dari angka dan rumus perhitungan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

5.3.1. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan semakin baik. (Halim, 2004 : 134). Besarnya biaya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul adalah 5 % dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

$$\text{Efisiensi pajak daerah} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}} \text{ X } 100\%$$

5.3.2. Efektivitas

Pengukuran efektivitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 %, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Apabila diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

(Halim, 2005 : 135)

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \text{ X } 100\%$$

5.3.3. Metode Regresi Terkecil/OLS (*Ordinary least square*)

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS *(Ordinary least square)*, dengan fungsi Y = f (X1, X2, X3), maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pajak daerah (Rp)

X_1 = PDRB (Juta Rp)

X_2 = Jumlah penduduk (Jiwa)

X_3 = Jumlah Wisatawan(orang)

B_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan Pengganggu

Asumsi-asumsi yang terkait dengan model garis regresi linear 2 variabel tersebut adalah: (Widarjono, 2005 : 35-36)

1. Asumsi pertama

   Hubungan antara Y (variabel dependen) dan X (variabel independen) adalah linear dalam parameter. Dalam hal ini β_1 berhubungan linear terhadap Y

2. Asumsi kedua

   Variabel X adalah varibel tidak stokastik yang nilainya tetap. Nilai X adalah tetap untuk berbgi observasi yang berulang-ulang. Jadi dengan sampel yang berulang-ulang nilai variabel independen (X) adalah tetap atau dengan kata lain variabel independen (X) adalah varibel yang dikontrol.

3. Asumsi ketiga

   Nilai harapan (*expected value*) atau rata-rata dari variabel gangguan ei adalah nol.

4. Asumsi keempat

   Varian dari variabel gangguan e_i adalah sama (Homoskedastisitas).

5. Asumsi kelima

   Tidak ada serial korelasi antara residual e_i atau residual e_i tidak saling berhubungan dengan e_j

6. Asumsi keenam

   Variabel gangguan e_i berdistribusi normal.

Asumsi-asumsi diatas pada model regresi linear klasik, model kuadrat terkecil (OLS) memiliki sifat ideal dengan teorema Gauss-Markov. Metode kuadrat terkecil akan menghasilkan apa yang disebut dengan estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang BLUE (*best linear unbiased estimators* = BLUE). Selanjutnya dengan pendekatan model regresi linear kuadrat terkecil (OLS) akan diperoleh perameter estimasi masing-masing variabel independen yang berpengaruh. Agar model tersebut dapat dianggap memenuhi syarat, maka terdapat dua pengujian yang harus dipenuhi, yaitu pengujian statistik yang meliputi uji t, uji F, dan uji determinasi (R^2) serta uji penyimpangan asumsi klasik.

5.3.4. Metode Trend Least Square

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu dan nilainya cukup rata. Trend data berkala bias berbentuk trend yang meningkat dan menurun secara mulus. Trend yang meningkat disebut

dengan trend positif dan trend yang menurun disebut trend negatif. Trend menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil.

Trend dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend, apabila Y menggambarkan data asli dan Y' merupakan data trend (Suharyadi, 2003 : 172-173)

Rumus garis trend dengan metode *least square* adalah:

$$Y' = a + b\,X$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Dimana: Y' = Perkembangan penerimaan pajak daerah

Y = Penerimaan pajak daerah

X = Skala tahunan (Variabel bebas)

n = Jumlah tahun

5.4. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linear ➔ $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
- Log Linier ➔ $\ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya *(fitted value)* dan selanjutnya dinamai F_1. Untuk mendapatkan nilai F_1 lakukan langkah sebagai berikut:
   - Lakukan regresi persamaan dan dapatkan residualnya (RES_1)
   - Dapatkan nilai prediksi $F_1 = Y - RES_1$
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2. Untuk mendapatkan nilai F_2 lakukan langkah sebagai berikut:
   - Lakukan regresi persamaan dan dapatkan residualnya (RES_2)
   - Dapatkan nilai prediksi $F_2 = \log Y - RES_2$
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \log F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah model linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul bahwa model yang tepat digunakan adalah model linier.

Estimasi persamaan berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha_3 \ln x_3 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis hipotesis alternatif bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier. (Widarjono, 2005 : 95-96)

5.5. Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian :

5.5.1. Uji t - statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :
   a. Jika Hipotesis positif

      Ho : $\beta i \leq 0$

      Ha : $\beta i > 0$

b. Jika Hipotesis negatif

Ho : $\beta i \geq 0$

Ha : $\beta i < 0$

2. Pengujian satu sisi

- Jika t tabel $\geq$ t hitung, Ho diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika t tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

t tabel = $n - k, \alpha$

k : Banyaknya variabel independen termasuk konstanta

n : Jumlah data

5.5.2. Uji F - statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

Ha : $\beta i \neq \beta_2 \neq \beta_3$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

F hitung didapat dari rumus sebagai berikut;

$$\text{F hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah parameter estimasi termasuk konstanta

n = Jumlah sampel

Hasil pengujiannya adalah :

Ho diterima (tidak signifikan) jika F hitung < F tabel (df = n – k)

Ho ditolak (signifikan) jika F hitung > F tabel (df = n – k)

F tabel = α, (k-1 , n-k)

5.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. Nilai R^2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

ESS : Jumlah kuadrat yang menjelaskan

TSS : Total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari ESS dan jumlah kuadrat residual (RSS)

5.6. Pengujian Asumsi Klasik (OLS)

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan:

5.6.1. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Akibat adanya autokorelasi terhadap penaksiran regresi adalah: (Gujarati, 1978: 207)

a. Varian residual nampaknya akan menaksir terlalu rendah (*underestimate*) varian residual sebenarnya
b. Bahkan jika varian residual tidak ditaksir terlalu rendah, varian dan kesalahan penaksir OLS nampaknya akan menaksir varian terlalu rendah dan juga kesalahan standar yang sebenarnya
c. Pengujian arti t dan F tidak lagi sah, dan jika diterapkan nampaknya memberikan kesimpulan yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

Oleh sebab itu untuk mengetahui keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey*. Metode *Breusch-Godfrey* lebih dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Dalam metode ini keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi sangat tergantung pada kelambanan *(lag)* yang dipilih. Untuk memilih panjangnya *lag* residual yang tepat dapat menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Akaike dan Schwarz. Berdasarkan criteria ini, panjang lag (p) yang dipilih adalah ketika nilai Akaike dan Schwarz paling kecil. Pada uji ini maka model persamaan akan mengikuti chi-square dengan df sebanyak p (lag).

Chi-square hitung dirumuskan dengan

$$(n - p)\, R^2 \approx \chi^2_p$$

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi.

- Ho : $\rho_1 = \rho_2 = ... = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi
- Ha : $\rho_1 \neq \rho_2 \neq .... \neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Adapun langkah-langkah dari uji LM ini adalah:

a. Melakukan regresi dengan menggunakan model empiris yang akan diestimasi kemudian mendapatkan nilai residunya.
b. Melakukan regresi dengan u1 sebagai varibel tidak bebas dan dengan memasukkan u1 sebagi variabel bebas atau
c. Menghitung nilai $(n-1) * R^2 = \chi^2_{hitung}$ dari hasil regresi persamaan diatas. n-1 karena jumlah efektif dari observasi

adalah n-1, dimana n adalah jumlah data.

d. Melakukan uji hipotesis nul (Ho) yang menjelaskan bahwa dalam model terdapat autokorelasi, dengan pedoman : apabila nilai χ^2_{hitung} lebih besar dibandingkan nilai χ^2_{tabel}, maka Ho ditolak, sebaliknya apabila nilai χ^2_{hitung} lebih kecil dibandingkan χ^2_{tabel}, Ho diterima, maka tidak terjadi autokorelasi (Rosyidah 2005 : 50-51).

5.6.2. Multikolinearitas

Merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas (independen) dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari varibel bebas lainnya atau merupakan hubungan linear antara variabel independen dimana dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang tidak sempurna. Dampak/konsekuensi dari adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut: Estimator masih bersifat BLUE *(Best Linear Unbiased Estimator)* dengan adanya multikolinearitas namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat (i), Akibat no 1, maka interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen (ii), Walaupun secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui statistik uji t, namun nilai koefisian determinasi (R^2) masih relatif tinggi (iii). (Widarjono, 2005 : 133)

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan membandingkan antara koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen dengan variabel dependen. Jika r^2 melebihi R^2 pada model regresi maka dari hasil regresi tersebut terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila R^2 lebih besar dari semua r^2 maka hal ini menunjukan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model regresi yang diuji.

$r^2 < R^2 \rightarrow$ tidak ada multikolinearitas

$r^2 > R^2 \rightarrow$ terdapat multikolinearitas

5.6.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai variabel yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) melainkan hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Konsekuensi jika estimator β_1 tidak mempunyai varian yang minimum adalah sebagai berikut: Jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya (i) serta akibat no 1 tersebut maka interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada

distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi (ii). (Widarjono, 2005 : 147)

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji *white*, yaitu tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual. Untuk menjelaskan metode *white*, ditulis model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + ei$$

Jika nilai chi-square hitung ($\chi 2$) lebih besar dari nilai $\chi 2$ kritis dengan derajat kepercayan tertentu (α) maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai $\chi 2$ kritis maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Selanjutnya dengan membandingkan antara χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} akan diketahui adanya heteroskedastisitas atau tidak:

$\chi^2_{\text{tabel}} > \chi^2_{\text{hitung}} \rightarrow$ tidak ada heteroskedastisitas.

$\chi^2_{\text{tabel}} < \chi^2_{\text{hitung}} \rightarrow$ terdapat heteroskedastisitas.

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewenangan mengatur daerahnya. Dimana hal ini sesuai dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan di daerah dapat terwujud.

Penelitian ini menggunakan 3 metode penelitian, yaitu: Metode Regresi Terkecil/OLS (*Ordinary least square*), dimana dalam penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian, tiga variabel penjelas (*Independen*) dan satu variabel terikat (*Dependen*), variabel penjelas terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk serta banyaknya wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan variabel terikat adalah penerimaan dari sektor pajak daerah selama tahun 1990-2004. Metode penelitian yang kedua adalah dengan menghitung tingkat efisiensi dan

efektivitas. Efisiensi pajak daerah diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi peneriman pajak daerah. Efektivitas pajak daerah diperoleh dari perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Metode yang terakhir adalah dengan metode *trend least square*. Analisis *trend* digunakan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul di tahun-tahun yang akan datang.

6.1. Efisiensi

Efisiensi pajak daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.. Besarnya biaya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul adalah 5 % dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan tingkat efisiensi adalah sbb:

TABEL 6.1.

Efisiensi Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997-2004

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi pajak Daerah (%)
1997	30.729.760	635.772.960	4.83
1998	35.687.268	807.150.099	4.42
1999	40.538.823	982.690.050	4.13
2000	42.526.252	901.596.895	4.72
2001	62.620.460	1.330.254.658	4.71
2002	77.982.907	1.892.344.797	4.12
2003	96.120.407	3.023.328.424	3.18
2004	133.152.600	2.776.741.439	4.80

Sumber : data diolah/lampiran II

Perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan angka yang sangat efisien. Dimana dalam kurun waktu 8 tahun ini tingkat efisiensi selalu dibawah 5 % dengan nilai rata-rata sebesar 4,36 %. Adapun pada tahun 1997 sebesar 4,83 %, di tahun 1998 sebesar 4,42 %, tahun 1999 sebesar 4,13 %, tahun 2000 sebesar 4,72 %, tahun 2001 sebesar 4,71 %, tahun 2002 sebesar 4,12 %, tahun 2003 sebesar 4,18 % serta tahun 2004 sebesar 4,80 %

6.2. Efektivitas

Efektivitas pajak daerah merupakan metode untuk mengukur hubungan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi (minimal 1 atau 100%) menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

TABEL 6.2.

Efektivitas Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997-2004

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas pajak Daerah (%)
1997	614.595.210	635.772.960	103.45
1998	713.745.375	807.150.099	113.09
1999	810.776.477	982.690.050	123.18
2000	850.525.050	901.596.895	106.04
2001	1.252.409.200	1.330.254.658	106.22
2002	1.559.658.159	1.892.344.797	121.33
2003	1.922.408.159	3.023.328.424	157.27
2004	2.663.052.000	2.776.741.439	104,27

Sumber : data diolah/lampiran III

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 cenderung mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Dimana di tahun 1997 sebesar 103,45 %, kemudian tahun 1998 naik sebesar 113,09 % serta 121,20 % di tahun 1999. Pada tahun 2000 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 106,04 % kemudian naik sebesar 106,22 % di tahun 2001 serta 121,33 % dan di tahun 2002. Di tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 157,27 % yang merupakan tingkat efektifitas tertinggi. Pada tahun 2004 turun menjadi sebesar 104,27 %, yang merupakan tingkat efektivitas terendah dalam kurun waku 1997-2004. Dengan rata-rata tingkat efektivitas diatas 100% yaitu sebesar 116,61 % menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah selalu melebihi target yang ditetapkan (tabel 6.2.).

6.3. Analisis Regresi

6.3.1. Pemilihan Model Regresi

Perhitungan dengan menggunakan metode Mackinon,White and Davidson (MWD) dengan pedoman bahwa jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul (Ho) bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah model linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul (Ho) bahwa model yang tepat digunakan adalah model linier. Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif (Ha) bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah

model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif (Ha) bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier.

TABEL 6.3.

Hasil Uji MWD

Model linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18579097	7871883.	-2.360185	0.0399
X1	0.790323	0.210658	3.751681	0.0038
X2	-0.100226	5.021170	-0.019961	0.9845
X3	25.64029	12.17775	2.105503	0.0615
Z1	37529.33	327384.3	0.114634	0.9110

Sumber: data diolah/lampiran VI

Model log linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-815.7171	96.30029	-8.470556	0.0000
LOG(X1)	-0.002183	0.191278	-0.011411	0.9911
LOG(X2)	1.752622	1.229415	1.425574	0.1845
LOG(X3)	59.73564	7.740582	7.717203	0.0000
Z2	-6.36E-07	2.54E-07	-2.501101	0.0314

Sumber: data diolah/lampiran VII

Hasil dari kedua regresi diatas menunjukkan bahwa:

Z1→ Jika signifikan model yang tepat digunakan adalah model linier sebaliknya jika tidak signifikan model yang tepat digunakan adalah linier.

Z2→ Jika signifikan model tepat digunakan adalah model log linier sebaliknya jika tidak signifikan model yang tepat digunakan adalah model log linier.

Jadi dari pertimbangan diatas maka model yang tepat digunakan adalah model linier.

6.3.2. Uji Statistik

6.3.2.1. Uji t – statistik (uji koefisien regresi secara parsial)

TABEL 6.4.

Hasil Pengujian secara Parsial

Variabel	Coefficient	t-Statistik	t-tabel	Keterangan
X1	0.788275	3.936205	1,796	Signifikan
X2	-0.116138	-0.024252	1,796	Tidak Signifikan
X3	25.73583	2.220250	1,796	Signifikan

Sumber: data diolah/lampiran IV

a. Uji t terhadap parameter X1 (uji satu sisi positif)

Hipotesisnya:

Bila Ho : $\beta_1 \leq 0$ → Variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Bila Ha : $\beta_1 > 0$ → Variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

t tabel = n – k, α

= 15 – 4, 0,05

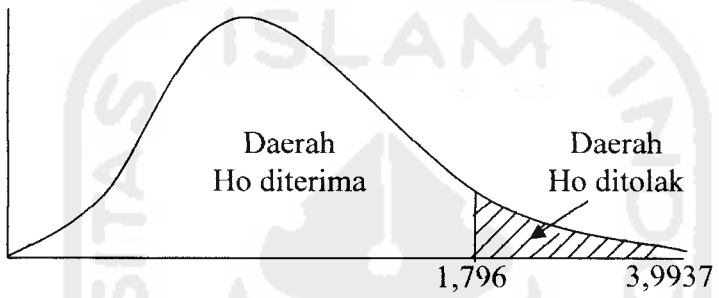
= 11, 0,05

= 1,796

* Karena nilai t hitung > t tabel yaitu 3.936205 > 1,796 maka Ho ditolak, Ha diterima sehingga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

GAMBAR 6.1.

Uji parameter variabel PDRB



b. Uji t terhadap parameter X2 (uji satu sisi negatif)

Bila Ho : $\beta_2 \geq 0$ → Variabel independen tidak berpengaruh positif dan atau berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Bila Ha : $\beta_2 < 0$ → Variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

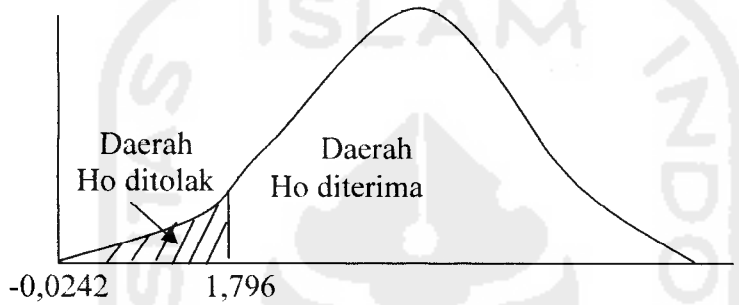
Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

* Karena nilai t hitung < t tabel yaitu -0,0242 < 1,796 maka Ho diterima, Ha ditolak sehingga jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

GAMBAR 6.2.

Uji parameter variabel jumlah wisatawan



c. Uji t terhadap parameter X3 (uji satu sisi positif)

Hipotesisnya:

Bila Ho : $\beta_3 \leq 0$ → Variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Bila Ha : $\beta_3 > 0$ → Variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

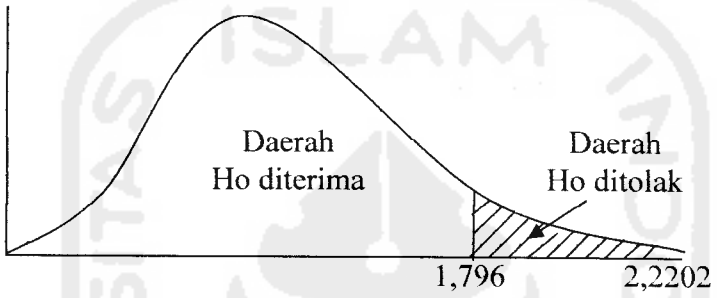
Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

* Karena nilai t hitung > t tabel yaitu 2.2202 > 1,796 maka Ho ditolak, Ha diterima sehingga jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

GAMBAR 6.3.

Uji parameter variabel jumlah penduduk



6.3.2.2. Uji F– statistik (uji koefisien regresi secara bersama-sama)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam perhitungan regresi didapatkan bahwa nilai F_{hitung} adalah 40,6490 sedangkan F_{tabel} 3, 59. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga hipotesis nul (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, jumlah wisatawan dan jumlah penduduk secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel peneriman pajak daerah.

F tabel = α, (k-1 , n-k)

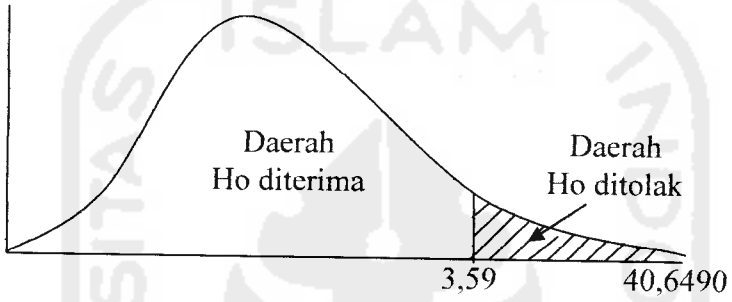
= 0,05 , 4-1, 15-4

= 0,05 , 3, 11

= 3, 59

GAMBAR 6.4.

Uji F- Statistik



6.3.2.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Merupakan ketepatan perkiraan yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel penjelas dapat menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan. Dari hasil estimasi diperoleh R^2 sebesar 0, 91726, artinya bahwa 91, 72% variasi perubahan variabel dependen (penerimaan pajak daerah) mampu dijelaskan oleh variasi perubahan independent (PDRB, jumlah wisatawan, dan jumlah penduduk), sisanya sebesar 8,28% diterangkan oleh variabel diluar model.

6.3.3. Uji Asumsi Klasik

6.3.3.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey.* Metode *Breusch-Godfrey* lebih dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Dalam metode ini keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi sangat tergantung pada kelambanan *(lag)* yang dipilih. Untuk memilih panjangnya *lag* residual yang tepat dapat menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Akaike dan Schwarz. Berdasarkan criteria ini, panjang lag (p) yang dipilih adalah ketika nilai Akaike dan Schwarz paling kecil. Pada uji ini maka model persamaan akan mengikuti chi-square dengan df sebanyak p (lag).

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi.

Ho : $\rho_1 = \rho_2 = ...= \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi

Ha : $\rho_1 \neq \rho_2 \neq ....\neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square ($\chi 2_{\text{ hitung}}$) = 9.354165 sedangkan $\chi 2_{\text{ -tabel}}$ = 9,43773 (df =4 ,α = 0,05), sehingga $\chi 2_{\text{ hitung}} < \chi 2_{\text{ tabel}}$ (9.354165 < 9,43773). Perbandingan antara $\chi 2_{\text{ hitung}}$ dengan $\chi 2_{\text{ tabel}}$, yang menunjukkan bahwa $\chi 2_{\text{ hitung}} < \chi 2_{\text{ tabel}}$, berarti Ho tidak dapat ditolak.

Berdasarkan hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi (tabel 6.5.)

TABEL 6.5.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.899445	Probability	0.104116
Obs*R-squared	9.354165	Probability	0.052832

Sumber: data diolah/lampiran VIII

6.3.3.2. Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan membandingkan antara koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen dengan variabel dependen. $R^2 = 0.91726$

TABEL 6.6.

Uji Mutikolinearitas

Variabel Penjelas	R^2	r^2	Keterangan
X1 dengan X2	0.917260	0.406972	tidak ada multikolinearitas
X1 dengan X3	0.917260	0.654189	tidak ada multikolinearitas
X2dengan X3	0.917260	0.651555	tidak ada multikolinearitas

Sumber: data diolah/lampiran IX

Berdasarkan tabel 6.6. diatas dapat diketahui bahwa $R^2 > r^2$, sehingga tidak terjadi multikolinearitas

6.3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Jika nilai chi-square hitung (χ^2) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayan tertentu (α) maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

$\chi^2_{tabel} > \chi^2_{hitung}$ → tidak ada heteroskedastisitas.

$\chi^2_{tabel} < \chi^2_{hitung}$ → terdapat heteroskedastisitas.

TABEL 6.7.

Uji White Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	3.184564	Probability	0.066665
Obs*R-squared	10.57316	Probability	0.102499

Sumber: data diolah/lampiran X

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa:

(Obs*R-squared = χ^2_{hitung}) = 10,57316 dengan df =6, sedangkan nilai kritis chi square(χ^2) atau χ^2_{tabel} pada α=5% dengan df sebesar 6 adalah 12, 5916 oleh karena nilai chi square hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis chi square (χ^2) atau χ^2_{tabel} maka dari perhitungan menggunakan uji white diatas dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

6.3.4. Interpretasi Hasil Analisis Regresi

Setelah melakukan estimasi terhadap estimasi terhadap model impiris yang terpilih yaitu model linier, maka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut semua basaran konstanta dan koefisien hasil regresi dimasukkan ke

dalam persamaan. Dengan demikian persamaan tersebut akan terlihat sebagai berikut:

Y = -18642216 + 0,788275 X1 -0,116138 X2 + 25,73583 X3

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan hasil regresi sebagai berikut:

a) Koefisien konstanta sebesar -18642216 memberikan arti bahwa jika perubahan PDRB (X1), jumlah wisatawan (X2) dan jumlah penduduk (X3) tetap maka penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul akan mengalami penurunan sebesar 18642216

b) Koefisien variabel independen PDRB sebesar 0,788275 memberikan arti bahwa jika PDRB naik sebesar satu satuan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,788275 dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap penerimaan pajak daerah.

c) Koefisien variabel independen jumlah wisatawan adalah sebesar -0,116138, hal ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.. Hal ini dikarenakan tiap tahun jumlah wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung di Kabupaten Gunungkidul tidak selalu mengalami kenaikan yang signifikan bahkan di tahun-tahun tertentu mengalami penurunan.

d) Koefisien variabel independen jumlah penduduk sebesar 25,73583 memberikan arti bahwa jika jumlah penduduk naik sebesar satu satuan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 25,73583

dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, khususnya penduduk yang sudah bekerja, (misal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak yang berasal dari tontonan) mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap penerimaan pajak daerah

6.4. Analisis trend

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu dan nilainya cukup rata. Trend data berkala bias berbentuk trend yang meningkat dan menurun secara mulus. Trend yang meningkat disebut dengan trend positif dan trend yang menurun disebut trend negatif. Trend menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. (Suharyadi, 2003 : 165)

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$a = \frac{13.503.949.392}{7} = 1.929.135.627$$

$$b = \frac{10.275.274.010}{28} = 366.974.071$$

Jadi persamaan trend untuk penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

$Y' = a + bX$

$Y' = 1.929.135.627 + 366.974.071\ X$

TABEL 6.8.

Hasil perhitungan trend penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 1999-2005

Tahun	Y	X	XY	X^2
1999	982.690.050	-3	-2.948.070.150	9
2000	901.596.895	-2	-1.803.193.790	4
2001	1.330.254.658	-1	-1.330.254.658	1
2002	1.892.344.797	0	0	0
2003	3.023.328.424	1	3.023.328.424	1
2004	2.776.741.439	2	5.553.482.878	4
2005	2.596.993.767	3	7.779.981.301	9
Jumlah	13.503.949.392	0	10.275.274.010	28

Sumber: data diolah

KETERANGAN:

Y' = Perkembangan penerimaan pajak daerah

Y = Penerimaan pajak daerah

X = Skala tahunan (Variabel bebas)

n = Jumlah tahun

Perhitungan trend diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah selama tahun 2006 sampai dengan 2008 diperkirakan akan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya pemerintah daerah hendaknya dapat lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada khususnya dalam hal penerimaan dari sektor pajak daerah. Metode *Trend Least Square* ini dapat dijadikan metode alternatif yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Penggunaan metode trend ini hanya salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui/memprediksi penerimaan pajak daerah di tahun-tahun yang akan datang (tabel 6.8.).

Berdasarkan persamaaan trend diatas maka dapat diperoleh prediksi penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

TABEL 6.9.

Prediksi penerimaah pajak daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006-2008

Nomor	Tahun Anggaran	Prediksi peneriman pajak daerah (Rp)
1.	2006	3.397.031.911
2.	2007	3.764.005.982
3.	2008	4.130.980.053

Sumber: data diolah/lampiran XI

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis didalam bab VI, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat efektivitas diatas 100% yaitu sebesar 116,61 % menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah selalu melebihi target yang ditetapkan.
2. Hasil perhitungan uji efisiensi dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan angka yang sangat efisien. Dimana dalam kurun waktu 8 tahun, tingkat efisiensi selalu dibawah 5% dengan nilai rata-rata sebesar 4, 36%.
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peneriman pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul, antara lain jumlah PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk. Berdasarkan pengujian serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen, artinya variabel PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk secara serempak/bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul

4. Pengujian secara individual dengan menggunakan uji t (uji secara parsial) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peneriman pajak daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
    a. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap peneriman pajak daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.
    b. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah wisatawan tidak banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
    c. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.
5. Perhitungan trend menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2008 di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan akan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa implikasi yang dapat dituliskan sebagai berikut;

1. Berdasarkan uji efektivitas dan efisiensi diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah efektif dan efisien. Hal ini

hendaknya dapat memacu dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan keadaan yang sudah ada serta dapat lebih meningkatkan mekanisme dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dari sektor penerimaan pajak daerah.

2. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel PDRB, jumlah wisatawan serta jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Tetapi dalam hal ini variabel jumlah wisatawan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah dituntut untuk lebih dapat memaksimalkan potensi yang ada khususnya dari sektor pariwisata sehingga diharapkan akan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
3. Dengan adanya suatu perkiraan/prediksi mengenai penerimaan keuangan daerah khususnya pajak daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai pedoman serta acuan untuk dapat merealisasikannya. Tetapi hendaknya hal ini dilkuti kebijakan pemerintah yang sesuai serta birokrasi yang sehat dan transparan. Disamping itu juga diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, *Gunungkidul Dalam Angka 1998-2004*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Produk Domestik Regional Bruto*

Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul, *Himpunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah*

Devas, Nick, Brian Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*", (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.

Halim, Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah,* edisi revisi, AMP YKPN, Yogyakarta..

Ismawan, Wakhid, 2004, "*Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bangka (1986-2002)*", Skripsi (tidak dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suharyadi, dkk, 2003, "*Statistika : untuk ekonomi dan keuangan modern*" Salemba empat, Jakarta.

Sriyana, Jaka, 1999, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah,* Jurnal Ekonomi Pembangunan; volume 4 nomor 1, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Kurniawan, Bayu, 2000, "*Analisa Pengaruh Peneriman Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Kalimantan Timur tahun 1987-2001*", Skripsi (tidak dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Mayasari, Dhian Pratita, 2005, "*Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul tahun 1999-2003*", Skripsi (tidak dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Rosyidah, Fitri, 2006, "*Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka 1988-2002*", Skripsi (tidak dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tjahjono, dkk, 1997, *Perpajakan,* edisi I, AMP YKPN, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia,* Salemba Empat, Jakarta.

Widarjono, Agus, 2005, *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi,* Ekonosia FE UII, Yogyakarta.

Widyastuti, Rina, 2005, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Surakarta tahun 1985-2000* ", Skripsi (tidak dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

LAMPIRAN I

Data penerimaan pajak daerah, jumlah wisatawan dan jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul tahun 1990-2004

Tahun	Y	X1	X2	X3
1990	59.746	201.460	269.366	707.267
1991	57.681	193.205	270.124	710.169
1992	69.552	213.630	272.419	713.094
1993	87.619	672.105	274.528	716.700
1994	103.276	725.912	297.846	720.643
1995	371.694	782.517	301.665	724.685
1996	557.462	838.463	306.304	729.655
1997	635.773	870.958	310.967	733.164
1998	807.150	890.348	300.847	736.293
1999	982.690	905.619	353.132	739.259
2000	901.597	930.496	279.322	743.282
2001	1.330.254	950.887	343.143	746.451
2002	1.892.344	964.596	333.183	749.875
2003	3.023.328	2.526.516	319.417	753.008
2004	2.776.741	2.613.269	353.132	755.941

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, berbagai terbitan

Dinas Pariwisata dan kebudayaan

KETERANGAN:

Y : Penerimaan pajak daerah (ribuan Rp)

X1 : PDRB (jutaan Rp)

X2 : Jumlah wisatawan (jiwa)

X3 : Jumlah penduduk (jiwa

LAMPIRAN II

Perhitungan tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Gunungkidul

$$\text{Tahun 1997} = \frac{30.729.760}{635.772.960} \times 100\% = 4{,}83\ \%$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{35.687.268}{807.150.099} \times 100\% = 4{,}42\ \%$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{40.538.823}{982.690.050} \times 100\% = 4{,}13\ \%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{42.526.252}{901.596.895} \times 100\% = 4{,}72\ \%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{62.620.460}{1.330.254.658} \times 100\% = 4{,}71\ \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{77.982.907}{1.892.344.797} \times 100\% = 4{,}12\ \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{96.120.407}{3.023.328.424} \times 100\% = 3{,}18\ \%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{133.152.600}{2.776.741.439} \times 100\% = 4{,}80\ \%$$

LAMPIRAN III

Efektivitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul

$$\text{Tahun 1997} = \frac{635.772.960}{614.595.210} \times 100\% = 103,45\ \%$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{807.150.099}{713.745.375} \times 100\% = 113,09\ \%$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{982.690.050}{810.776.477} \times 100\% = 121,20\ \%$$

$$\text{Tahun 2000} = \frac{901.596.895}{850.525.050} \times 100\% = 106,04\ \%$$

$$\text{Tahun 2001} = \frac{1.330.254.658}{1.252.409.200} \times 100\% = 106,22\ \%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{1.892.344.797}{1.559.658.159} \times 100\% = 121,33\ \%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{3.023.328.424}{1.922.408.159} \times 100\% = 157,27\ \%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{2.776.741.439}{2.663.052.000} \times 100\% = 104,27\ \%$$

LAMPIRAN IV

Hasil Regresi Linier

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 16:21
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18642216	7492081.	-2.488256	0.0301
X1	0.788275	0.200263	3.936205	0.0023
X2	-0.116138	4.788812	-0.024252	0.9811
X3	25.73583	11.59141	2.220250	0.0483

R-squared	0.917260	Mean dependent var	910460.5
Adjusted R-squared	0.894695	S.D. dependent var	966603.9
S.E. of regression	313670.0	Akaike info criterion	28.37325
Sum squared resid	1.08E+12	Schwarz criterion	28.56206
Log likelihood	-208.7994	F-statistic	40.64905
Durbin-Watson stat	0.742148	Prob(F-statistic)	0.000003

LAMPIRAN V

Hasil regresi log linier

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 16:22
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-781.9226	115.9081	-6.746054	0.0000
LOG(X1)	0.064054	0.230285	0.278149	0.7861
LOG(X2)	1.072898	1.457550	0.736097	0.4771
LOG(X3)	57.80104	9.362639	6.173584	0.0001

R-squared	0.964253	Mean dependent var	12.99200
Adjusted R-squared	0.954504	S.D. dependent var	1.425078
S.E. of regression	0.303967	Akaike info criterion	0.679381
Sum squared resid	1.016353	Schwarz criterion	0.868194
Log likelihood	-1.095354	F-statistic	98.90617
Durbin-Watson stat	1.352903	Prob(F-statistic)	0.000000

LAMPIRAN VI

Hasil uji MWD (Model lin-lin)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 16:26
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18579097	7871883.	-2.360185	0.0399
X1	0.790323	0.210658	3.751681	0.0038
X2	-0.100226	5.021170	-0.019961	0.9845
X3	25.64029	12.17775	2.105503	0.0615
Z1	37529.33	327384.3	0.114634	0.9110

R-squared	0.917369	Mean dependent var	910460.5
Adjusted R-squared	0.884317	S.D. dependent var	966603.9
S.E. of regression	328764.0	Akaike info criterion	28.50527
Sum squared resid	1.08E+12	Schwarz criterion	28.74129
Log likelihood	-208.7895	F-statistic	27.75497
Durbin-Watson stat	0.718022	Prob(F-statistic)	0.000022

LAMPIRAN VII

Hasil uji MWD (Model log-lin)

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 16:26
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-815.7171	96.30029	-8.470556	0.0000
LOG(X1)	-0.002183	0.191278	-0.011411	0.9911
LOG(X2)	1.752622	1.229415	1.425574	0.1845
LOG(X3)	59.73564	7.740582	7.717203	0.0000
Z2	-6.36E-07	2.54E-07	-2.501101	0.0314

R-squared	0.978009	Mean dependent var	
Adjusted R-squared	0.969213	S.D. dependent var	
S.E. of regression	0.250047	Akaike info criterion	
Sum squared resid	0.625236	Schwarz criterion	
Log likelihood	2.548495	F-statistic	
Durbin-Watson stat	1.623721	Prob(F-statistic)	

LAMPIRAN VIII

Hasil uji Autokorelasi

F-statistic	2.899445	Probability	0.104116
Obs*R-squared	9.354165	Probability	0.052832

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 19:31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2383812.	8750693.	-0.272414	0.7932
X1	-0.274936	0.246712	-1.114399	0.3019
X2	4.978521	3.985702	1.249095	0.2518
X3	1.521669	12.83089	0.118594	0.9089
RESID(-1)	1.149821	0.361124	3.184006	0.0154
RESID(-2)	-0.410695	0.482405	-0.851349	0.4227
RESID(-3)	-0.028224	0.527637	-0.053490	0.9588
RESID(-4)	0.060977	0.498724	0.122266	0.9061

R-squared	0.623611	Mean dependent var	-3.89E-09
Adjusted R-squared	0.247222	S.D. dependent var	278038.8
S.E. of regression	241234.2	Akaike info criterion	27.92945
Sum squared resid	4.07E+11	Schwarz criterion	28.30708
Log likelihood	-201.4709	F-statistic	1.656826
Durbin-Watson stat	1.636963	Prob(F-statistic)	0.260657

LAMPIRAN IX

Hasil uji multikolinearitas

X1 dengan X2

Dependent Variable: X1
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 20:12
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3729047.	1574090.	-2.369018	0.0340
X2	15.31290	5.126742	2.986867	0.0105

R-squared	0.406972	Mean dependent var	951998.7
Adjusted R-squared	0.361354	S.D. dependent var	712510.7
S.E. of regression	569405.3	Akaike info criterion	29.46614
Sum squared resid	4.21E+12	Schwarz criterion	29.56054
Log likelihood	-218.9960	F-statistic	8.921376
Durbin-Watson stat	1.548735	Prob(F-statistic)	0.010501

X1 dengan X3

Dependent Variable: X1
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 20:13
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25314838	5297870.	-4.778305	0.0004
X3	35.88535	7.236243	4.959114	0.0003

R-squared	0.654189	Mean dependent var	951998.7
Adjusted R-squared	0.627588	S.D. dependent var	712510.7
S.E. of regression	434813.5	Akaike info criterion	28.92679
Sum squared resid	2.46E+12	Schwarz criterion	29.02119
Log likelihood	-214.9509	F-statistic	24.59281
Durbin-Watson stat	0.944129	Prob(F-statistic)	0.000261

X2 dengan X3

Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 20:15
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-786391.3	221551.0	-3.549482	0.0036
X3	1.491989	0.302612	4.930375	0.0003

R-squared	0.651555	Mean dependent var	305693.0
Adjusted R-squared	0.624751	S.D. dependent var	29683.56
S.E. of regression	18183.42	Akaike info criterion	22.57797
Sum squared resid	4.30E+09	Schwarz criterion	22.67238
Log likelihood	-167.3348	F-statistic	24.30859
Durbin-Watson stat	3.290560	Prob(F-statistic)	0.000275

LAMPIRAN X

Hasil uji heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.184564	Probability	0.066665
Obs*R-squared	10.57316	Probability	0.102499

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/18/06 Time: 20:04
Sample: 1990 2004
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.73E+14	8.06E+13	3.383983	0.0096
X1	217105.1	235670.3	0.921224	0.3839
X1^2	-0.100413	0.071212	-1.410053	0.1962
X2	44335085	16444412	2.696058	0.0272
X2^2	-71.60276	25.95834	-2.758372	0.0247
X3	-7.65E+08	2.22E+08	-3.454601	0.0086
X3^2	523.7103	150.6529	3.476271	0.0084

R-squared	0.704877	Mean dependent var	7.22E+10
Adjusted R-squared	0.483536	S.D. dependent var	6.77E+10
S.E. of regression	4.86E+10	Akaike info criterion	52.35714
Sum squared resid	1.89E+22	Schwarz criterion	52.68757
Log likelihood	-385.6786	F-statistic	3.184564
Durbin-Watson stat	2.875465	Prob(F-statistic)	0.066665

Chi Square tabel = 12.5916

Chi Square hitung = 10.57316

LAMPIRAN XI

Prediksi penerimaan pajak daerah dengan perhitungan trend

- Tahun 2006

  Y' = a + bX

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 X

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 (4)

  Y' = 3.311.732.479

- Tahun 2007

  Y' = a + bX

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 X

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 (5)

  Y' = 3.650.142.471

- Tahun 2008

  Y' = a + bX

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 X

  Y' = 1.788.887.515 + 338.409.992 (6)

  Y' = 3.988.552.46